

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memasuki era ekonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 (diamandemen menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU nomor 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan tetap berpedoman pada yang berlaku.

Selanjutnya lahirnya BUMD diilhami oleh peraturan Perundang-undangan No 17 tahun 1960, dan lahirnya UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No. 6 tahun 1969 pengganti UU No.5 tahun 1962

Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hidup utama bagi orang banyak juga sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan terhadap masyarakat.

PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan air minum khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan utama dalam PDAM ini bukan hanya sekedar mencari laba tetapi fungsi sosial dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan air minum untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan berkembangnya PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang sedemikian rupa ini, kiranya sudah cukup di sadari bahwa PDAM merupakan suatu usaha pelayanan air minum yang perlu dikelola secara professional karena menyerap banyak tenaga kerja, dana dan prasarana.

Seiring dengan hal tersebut maka disadari pula bahwa akuntansi merupakan alat yang efektif untuk membantu pimpinan PDAM dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pimpinan pada masing-masing bagian membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan, baik mengenai persoalan operasional rutin ditingkat bawah maupun mengenai persoalan-persoalan kebijakan ditingkat atas. Untuk mencapai tujuan diatas, maka penyelenggara, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat.

PSAK IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Pada umumnya perusahaan menengah dan kecil sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga pada tanggal 17 Juli 2009 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah disahkan DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitasnya belum terdaftar pada otoritas pasar modal atau regulator lain yang bertujuan untuk penerbitan efek di pasar modal) dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang *Small Medium Enterprise* (Usaha Kecil Menengah). SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK ETAP bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil atau menengah untuk

menyusun laporan keuangan sehingga dapat berguna bagi pihak Intern. Sesuai dengan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maka standart ini dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) akan mempermudah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menyusun laporan keuangan SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum, di mana pengaturan dan perhitungan akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah ke bawah. Dengan penggunaan sistem ini, maka PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan.

SAK-ETAP bertujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan daerah air minum khususnya Kabupaten Sidoarjo dalam membuat laporan keuangan dan membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, dimana pengaturan dan perhitungan akan lebih sederhana.

Dengan hadirnya SAK-ETAP di Indonesia diharapkan perusahaan khususnya Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP, agar dapat di audit dan membuat opini audit.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penyusunan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis penyajian laporan keuangan pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

2. Mengetahui dan menganalisis implementasi apakah penyajian laporan keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan SAK-ETAP

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi pihak akademik, hasil dari penelitian ini dapat menambah literature dalam melakukan kajian mengenai SAK-ETAP juga dapat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak organisasi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apakah laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku saat ini atau belum.
3. Bagi pihak penulis, ingin mengkaji lebih jauh mengenai SAK ETAP dalam kaitannya dengan analisis implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan di PDAM.